

PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF

Oleh: Suparno *

Hukum yang dibuat, baik oleh lembaga legislatif maupun yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga akan mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Hal tersebut paralel dengan irah-irah dari putusan hakim yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hukum progresif mencoba memberikan solusi bagaimana mewujudkan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Bagaimana membentuk dan menegakkan hukum progresif demi mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan dalam masyarakat?

Keadilan yang diharapkan selalu menyertai kehidupan masyarakat dapat dimulai dari saat pembentukan hukum sampai pada penegakan hukumnya. Pembentukan hukum (dalam Negara modern dikenal dengan undang-undang) diawali dengan munculnya ide atau gagasan untuk mengatur suatu permasalahan, yang melalui proses secara kritis, pematangan dan penajaman, serta disusun dalam rumusan hukum maka pada saat tertentu akan lahir hukum (undang-undang). Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum, khususnya hukum progresif adalah perlunya menggali nilai-nilai dari segi-segi sosiologis, antropologis dan kebudayaan.

Nilai-nilai sosiologis, antropologis dan kebudayaan yang dapat digali dalam rangka pembentukan atau pembaharuan hukum progresif guna mewujudkan keadilan adalah: (1) hukum dibuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (2) adanya sinergi antara kepentingan rakyat dan Negara atau pemerintah pusat dan daerah; (3) adanya harmonisasi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya; dan (4) perlunya koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Hukum di samping bertujuan menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan juga dapat dipakai sebagai alat (*tool*) untuk melakukan pembangunan dalam masyarakat. Melakukan pembangunan dalam masyarakat pada intinya adalah dalam rangka menyejahterakan rakyat dan bangsa.

Menegakan hukum progresif bukanlah sekedar menegakkan norma aturan itu sendiri, namun hukum yang harus ditegakkan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila nilai-nilai keadilan selalu mengiringi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum progresif harus memperhatikan nilai-nilai sosiologis, antropologis dan kebudayaan, sedang penegakannya harus memperhatikan asas-asas penerapan hukum, seperti asas manfaat, asas persatuan, persamaan di hadapan hukum, dan lain-lain.

Kata kunci: *pembentukan hukum, penegakan hukum, hukum progresif, dan keadilan.*

Hukum selalu berhubungan dengan kehidupan manusia¹ yang berada dalam suatu kelompok manusia atau suatu masyarakat, sehingga dalam suatu masyarakat selalu memiliki hukum. Pengertian hukum di sini dapat berupa hukum yang tumbuh dari kebiasaan di masyarakat maupun hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan bahkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat keniasaan dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*).²

Hukum yang hidup di dalam masyarakat yang lahir karena kebiasaan sering disebut dengan hukum yang tidak tertulis, yang dapat berupa kebiasaan, atau hukum adat. Akan tetapi hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sering disebut dengan hukum tertulis atau dalam Negara-negara modern disebut dengan hukum perundang-undangan.

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharap-

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 1.

²Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Epistama Institute dan Huma, Jakarta, 2012,

kan kepentingan manusia akan terlindungi.³ Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain.⁴

Beberapa kasus di masyarakat dirasa penegakan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti kasus "nenek Minah" yang memetik 3 (tiga) buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) dihukum 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.⁵ Kasus lainnya seperti kasus "petaka semangka", dan kasus "curhat medik" Prita Mulyasari menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak kaum plebeius secara serampangan.⁶ Melihat beberapa kasus yang putusan hakimnya dirasa kurang menjamin keadilan, Satjipto Rahardjo menggagas suatu hukum yang progresif, yang sering disebut dengan hukum progresif. Namun belum banyak dikaji bagaimana membentuk dan menegakkan hukum progresif.

Mengacu pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dicarikan solusinya adalah bagaimana membentuk dan menegakkan hukum progresif demi mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan bahkan kesejahteraan dalam masyarakat?

Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban. Ketertiban hukum merupakan konfigurasi dari berbagai lembaga seperti hukum dan tradisi.⁷ Unger menyebut bahwa kajian hukum berhubungan erat dengan masalah tatanan sosial.⁸

Hans Kelsen melihat hukum sebagai suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami sebagai sistem.⁹

Pendapat yang lebih luas seperti Muchtar Kusuma Atmadja menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah

³ *Op cit*, hlm. 57

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 53.

⁵ detikNews, 19 Nopember 2009.

⁶ Djarumbeasiswaplus.org, artikel: *Quo Vadis Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

⁸ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Nusa Media, 2010, hlm. 55

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan), 2010, Nusa Media, Bandung, hlm. 3-4

moral, agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain) yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*living law*).¹⁰

Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Esmi Warassih menjelaskan bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen substansi yaitu berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹¹

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diambil pengertian bahwa hukum merupakan bagian dari suatu sistem masyarakat yang lebih luas. Sebagai bagian atau sub sistem kemasyarakatan, hukum juga terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan. Di samping itu hukum juga terdiri dari komponen-komponen yang akan mempengaruhi pelaksanaannya atau pun penegakannya, yaitu berupa struktur (kelembagaan), substansi (isi peraturan) dan kultur (budaya).

Roberto M. Unger berpandangan lain yaitu terdapat dua konsep dalam hukum. *Pertama*, dalam pengertian yang paling luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang di antara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relatif eksplisit dari kelompok dan individu tersebut, menimbulkan pola-pola interaksi dan memunculkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus dipenuhi, yang disebut hukum adat (*Customary Law*) atau hukum interaksional (*Interactional Law*).¹²

Berbeda dengan Unger, HLA. Hart menilai bahwa adat istiadat (hukum adat) dalam negara modern tidak termasuk sumber hukum yang terlalu penting. Biasanya adat menjadi sumber hukum yang bersifat bawahan (subordinat), dalam pengertian bahwa badan legislatif melalui undang-undang menghilangkan status hukum dari sebuah peraturan adat.¹³

Konsep hukum yang kedua adalah konsep hukum birokratis (*bureaucratic law*) atau hukum pengatur (*regulatory law*). Konsep hukum ini sifatnya publik

¹⁰ Shidarta, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, dalam buku Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi, Epistema Institute, Epistema dan Huma, Jakarta, hal. 19.

¹¹ Esmi Warassih, *Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandarau Utama, Semarang, 2005, hal. 30.

¹² Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis (terjemahan)*, Nusa Media, 2010, hlm. 63.

¹³ HLA. Hart, *Konsep Hukum*, (terjemahan), Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 71.

dan positif. Hukum birokratis terdiri dari peraturan-peraturan eksplisit yang ditetapkan atau ditegakkan oleh pemerintah yang sah.¹⁴

Masih ada konsep hukum yang ketiga yang lebih sempit. Tidak banyak dikenal oleh semua jenis masyarakat, hukum ketiga ini muncul dan bertahan hidup hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa. Hukum yang ketiga ini disebut tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum (*legal system*). Hukum sebagai tatanan hukum ini diyakini bersifat general dan otonom, sekaligus publik dan positif.¹⁵

Dalam perkembangannya hukum tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku, namun hukum telah mengarah fungsi atau penggunaannya yaitu sebagai sarana atau alat (*a tool*). Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk merealisasi kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan dan keamanan nasional.¹⁶

Hukum yang tidak ditaati atau yang dilanggar perlu dikembalikan pada kondisi yang diinginkan oleh hukum, sehingga pihak-pihak yang dirugikan akan mendapatkan kompensasi yang seimbang dengan hak yang dilanggar pihak lain.

E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia sebagaimana dikutip Bintang Regen Saragih menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (yang biasanya disebut norma atau kaidah), perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan, dan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan pemerintah atau penguasa masyarakat. Petunjuk hidup itu dilengkapi, atau diperkuat dengan anasir yang memaksa (*element van dwang*).¹⁷

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu: (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.¹⁸ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu tidak ada yang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar.¹⁹

¹⁴Op Cit, hlm. 65

¹⁵Op Cit, hlm. 67

¹⁶Esmi Warassih, *Op Cit*, hal. 20.

¹⁷Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm 9

¹⁸Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi (Terjemahan)*, Huma, Jakarta, 2003, hlm. 12

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 60

Hukum represif menganggap bahwa keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya tatanan hukum memiliki potensi represif.²⁰

Pada hukum otonom, tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi, yang mengalami perkembangan menuju pada *Rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum) yang memiliki karakter utamanya yaitu terbentuknya institusi-institusi hukum yang terspesialisasi dan relatif otonom yang mengklaim suatu supremasi memenuhi syarat di dalam bidang-bidang kompetensi yang ditentukan.²¹

Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hukum yang dibuat harus menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.²²

Dari uraian pengertian dan ciri-ciri hukum sebagaimana dikemukakan beberapa sarjana di atas dapat diketahui bahwa hukum mengandung komponen-komponen sebagai berikut: (1) merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat; (2) merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; (3) terdiri atas komponen struktur, substansi dan kultur; dan (4) diperkuat dengan anasir yang bersifat memaksa.

Pembentukan Hukum Progresif

Hukum tidak dihasilkan oleh opini mayoritas seperti halnya ketika seorang presiden dihasilkan oleh suara mayoritas. Naïf kiranya kalau kita membayangkan bahwa opini mayoritas dan orang-orang kebanyakan otomatis menjadi hukum. Jadi, yang membentuk hukum bukanlah "*opini public*", melainkan kekuatan sosial yang benar-benar dikerahkan. Kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh sosial muncul dalam berbagai ukuran dan bentuk.²³

Dengan mengacu pada pengertian dan asal hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka hukum yang dibentuk atau dibangun harus mengandung komponen-komponen sebagai berikut: (1) merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat; (2) merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; (3) terdiri atas komponen struktur, substansi dan kultur; dan (4) diperkuat dengan anasir yang bersifat memaksa.

Pound berpendapat bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan

²⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op Cit*, hlm. 23

²¹ *Op Cit*, hlm. 43

²² *Op Cit*, hlm. 59

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Social Science Perspective (terjemahan)*, Nusamedia, 2011, Bandung, hlm. 211, 221

substansif.²⁴

Muchsan melihat produk hukum lebih pada kepentingan masyarakat yang berpendapat bahwa sebuah produk hukum yang baik haruslah produk hukum yang populis, artinya produk hukum tersebut dapat diterima dalam masyarakat yang mewujudkan keadilan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat umum.²⁵

Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum itu bermacam-macam dan hukum progresif memiliki tempatnya sendiri. Cara berhukum secara progresif tidak sekedar menerapkan hukum positif legalistik, menerapkan undang-undang, membaca atau mengeja undang-undang dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum ini lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian.²⁶

Berhukum tidak dilakukan dengan mengutak atik teks undang-undang dan menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan nurani. Dalam hukum progresif, berhukum atau menjalankan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, yang tidak pernah berhenti melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia.²⁷

Dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan sebagai hukum progresif jika hukum mengandung komponen-komponen tersebut di atas dan hukum harus responsif dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat atau sosial. Disamping hal tersebut hukum progresif harus memperhatikan nilai-nilai sosiologis, antropologis dan kebudayaan, serta harus mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan kebudayaan, maka budaya memungkinkan terjadinya penyesuaian secara cepat terhadap perubahan-perubahan lingkungan.²⁸

Penegakan Hukum Progresif

Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang dibuat, baik oleh lembaga legislatif maupun yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga akan mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, bahkan

²⁴ Op Cit, hlm. 59-60

²⁵ [ikyndx.blogspot.com/2010/07, Fungsi Penjelasan Dalam Pembuatan Produk Hukum.](http://ikyndx.blogspot.com/2010/07/Fungsi_Penjelasan_Dalam_Pembuatan_Produk_Hukum)

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai dengan implementasi*, Rajawali Press, 2009, Jakarta, hlm. 3.

²⁷ Ibid, hlm. 5

²⁸ Edward O. Wilson, *Consilience*, Alfred A. Knoff, New York, 1998, hlm. 128.

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut paralel dengan irah-irah dari putusan hakim yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penegakan hukum merupakan kelanjutan dari hukum yang telah dibuat. Penegakan hukum dilaksanakan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut.²⁹

Satjipto Rahardjo³⁰ mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak, seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dapat dikatakan pula bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan menjadi kenyataan.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie³¹ adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya³².

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.³³

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian 'law enforcement' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiil, yang diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau pengadilan keadilan.³⁴

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 181

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, CV Sinar Baru, Bandung, tt, hlm. 15

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, hlm. 1

³² *Loc Cit*

³³ Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*,

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Loc Cit*

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum bergantung pada sumber-sumber daya yang ada padanya. Misalnya, sepuluh orang polisi di jalanan yang sibuk bisa menangkap lebih banyak pengebut daripada lima orang polisi.³⁵

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama atau panglima, di atas politik dan ekonomi. Suburnya *judicial corruption* dalam proses peradilan saat ini yang mengakibatkan hancurnya sistem hukum. Lembaga peradilan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum.

Hukum dan lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang penting, namun kelihatan kecil jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk atau mode-mode yang mengatur perilaku.³⁶

Dapat dilihat dalam pelaksanaannya di pengadilan, hakim melakukan penyelewengan berupa penyelesaian perkara yang tidak adil dan juga menghasilkan putusan-putusan yang dapat diintervensi. Hal tersebut bisa muncul karena adanya faktor-faktor penyebab antara lain seperti gaji hakim yang dipandang kecil yang tidak sebanding dengan risiko dan tanggungjawabnya, tekanan dari kekuasaan yang lebih tinggi, intervensi politik dan ekonomi, dan juga berhubungan dengan integritas dan moralitas hakim itu sendiri.

Memperhatikan kondisi peradilan di atas membuat profesionalitas penegak hukum di negeri ini seolah berada pada titik nadir, padahal Penegak hukum didengungkan sebagai profesi luhur (*honorable profession*), namun di sisi lain diperburuk citranya dengan perilaku koruptif. Jual beli perkara tidak lagi dipandang aneh, tetapi dianggap wajar. Semua menjadi pertanda, bahwa berbagai peraturan hukum yang secara normatif mengatur seluruh proses peradilan akhirnya tak berdaya mengatasi *judicial corruption*. Sebagai nilai yang menjadi jiwa (*core value*) hukum, keadilan tidak benar-benar diperjuangkan.

Oleh kebanyakan penegak hukum, profesi penegak hukum direduksi menjadi sekadar pekerjaan guna mendapat materi. Pemahaman seperti itu

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Social Science Perspective (terjemahan)*, Nusamedia, 2011, Bandung, hlm. 121

³⁶ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Sociology of Law, Law Enforcement and Social Control*, Penguin Books, Baltimore, Maryland, 1969, p. 127

mengabaikan dimensi pelayanan sebagai unsur esensial profesi itu. Para profesional penegak hukum lupa, profesi adalah peran sosial yang eksistensi dan fungsinya tergantung pelayanan yang fair atas kepentingan masyarakat.

Oleh karena kondisi yang demikian maka Satjipto Rahardjo menggagas penegakan hukum dan keadilan progresif. Penegakan hukum progresif mendorong hakim untuk progresif, hakim yang lebih berhati nurani yaitu hakim yang sekaligus adalah sosiolog.³⁷

Hukum progresif mencoba memberikan solusi bagaimana mewujudkan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, serta kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Keadilan menurut John Rawls merupakan institusi sosial pertama yang menggunakan sistem pemikiran yang benar. Keadilan bukan berarti hilangnya kebebasan untuk berbuat benar dengan memberikan kebaikan yang lebih besar yang dimiliki orang lain.³⁸

Menegakkan hukum progresif bukanlah sekedar menegakkan norma aturan itu sendiri, namun hukum yang harus ditegakkan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila nilai-nilai keadilan selalu mengiringi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.

Penegakan hukum progresif harus memperhatikan asas-asas penerapan hukum, seperti asas manfaat, asas persatuan, persamaan di hadapan hukum, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa penegakan hukum harus memperhatikan asas-asas penerapan hukum, seperti asas manfaat, asas persatuan, persamaan di hadapan hukum, dan lain-lain. Disamping itu seorang penegak hukum yang akan menegakkan hukumnya harus memiliki moral yang baik, integritas yang tinggi dan memiliki keberanian dalam mengambil putusan yang mungkin menyimpang dari hukum positif yang berlaku.

Penutup

Keadilan yang diharapkan selalu menyertai kehidupan masyarakat dapat dimulai dari saat pembentukan hukum sampai pada penegakan hukumnya. Pembentukan hukum (dalam Negara modern dikenal dengan undang-

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 54, 56, 92

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, p. 3.

undang) diawali dengan munculnya ide atau gagasan untuk mengatur suatu permasalahan, yang melalui proses secara kritis, pematangan dan penajaman, serta disusun dalam rumusan hukum maka pada saat tertentu akan lahir hukum (undang-undang). Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum, khususnya hukum progresif adalah perlunya menggali nilai-nilai dari segi-segi sosiologis, antropologis dan kebudayaan.

Nilai-nilai sosiologis, antropologis dan kebudayaan yang dapat digali dalam rangka pembentukan atau pembaharuan hukum progresif guna mewujudkan keadilan adalah: (1) hukum dibuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (2) adanya sinergi antara kepentingan rakyat dan Negara atau pemerintah pusat dan daerah; (3) adanya harmonisasi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya; dan (4) perlunya koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Hukum di samping bertujuan menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan juga dapat dipakai sebagai alat (*tool*) untuk melakukan pembangunan dalam masyarakat. Melakukan pembangunan dalam masyarakat pada intinya adalah dalam rangka membahagiakan dan menyejahterakan rakyat dan bangsa.

Penegakan hukum progresif harus memperhatikan asas-asas penerapan hukum, seperti asas manfaat, asas persatuan, persamaan di hadapan hukum, dan lain-lain.

Disamping itu seorang penegak hukum yang akan menegakkan hukum harus memiliki moral yang baik, integritas yang tinggi dan memiliki keberanian dalam mengambil putusan yang mungkin menyimpang dari hukum positif yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Michael Banton, 1969, *Sociology of Law, Law Enforcement and Social Control*, Penguin Books, Baltimore, Maryland
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bintan Regen Saragih, 2006, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung.
- detikNews, 19 Nopember 2009.
- Djarumbeasiswaplus.org, artikel: *Quo Vadis Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*.
- Edward O. Wilson, 2005, *Consilience*, Alfred A. Knoff, New York, 1998, hlm. 128.
- Esmi Warassih, 2000, *Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandarau Utama,

Semarang.

Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum* lkyndx.blogspot.com/2010/07, *Fungsi Penjelasan Dalam Pembuatan Produk Hukum*.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>.

John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Social Science Perspective (terjemahan)*, Nusamedia, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Epistama Institute dan Huma, Jakarta.

Philippe Nonet dan Philip Seznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di masa Transisi (Terjemahan)*, Huma, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., tt, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, CV Sinar Baru, Bandung.

....., 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

....., 2009, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai dengan implementasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Shidarta, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*, dalam buku Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi, Epistama Institute, Epistama dan Huma, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta